KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Meski pasokan energi aman, pemerintah perlu mitigasi penutupan selat Hormuz
Tanggal : Jumat, 10 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Meski Pasokan Energi Aman

Pemerintah Perlu Mitigasi Penutupan Selat Hormuz

KOMISI XII DPR mendapat kepastian soal kondisi produksi, pasokan hingga distribusi minyak dan gas (migas) nasional dalam kondisi aman dan terkendali. Situasi sektor hilir dan hulu secara umum juga sudah terjamin baik.

Ketua Komisi XII Bambang Patijaya menjelaskan, dari sisi hulu, SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) melaporkan lifting migas masih sesuai target dalam APBN. Di sisi hilir, BPH Migas memastikan penyaluran BBM berjalan lancar. Pengawasan dilakukan secara ketat dengan melibatkan aparat penegak hukum guna mencegah segala bentuk potensi penyalahgunaan di lapangan.

Karena itu, Bambang mengimbau masyarakat menggunakan BBM secara bijak dan tepat sasaran demi menjaga stabilitas pasokan nasional. Di saat yang sama, penindakan tegas terhadap praktik penyelewengan harus dilakukan. "Pemberian sanksi berat perlu masuk kategori tindak pidana korupsi guna menimbulkan efek jera para pelaku," katanya, kemarin.

Dia menjelaskan, langkah mitigasi untuk memastikan pasokan BBM maupun minyak mentah tetap berjalan lancar juga telah disiapkan Pemerintah, termasuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan di Selat Hormuz. Mitigasi itu menjamin proses pengadaan serta penyaluran energi ke seluruh wilayah tidak akan mengalami gangguan.

Bambang menegaskan, di tengah situasi geopolitik global yang saat ini tidak menentu, peran serta seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk menjaga ketahanan energi nasional. "Kesadaran bersama menjadi kunci utama karena ketahanan energi merupakan tanggung jawab yang harus dijaga bersama seluruh elemen masyarakat demi kepentingan bangsa," katanya.

Anggota Komisi XII Dewi Yustisiana menambahkan, penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi melalui penyelundupan masih menjadi permasalahan besar yang meresahkan. Agar kebocoran itu tidak terus terjadi, pengawasan di lapangan harus semakin diperketat. Langkah ini diambil untuk mencegah kerugian negara serta melindungi hak masyarakat yang membutuhkan.

Dewi menegaskan, PT Pertamina Patra Niaga harus bekerja maksimal dalam mendistribusikan energi. Sedangkan BPH Migas diharapkan berkolaborasi lebih baik dengan pihak terkait untuk memperkuat pengawasan. ■ PYB